JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 1, 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM KB METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) DI KECAMATAN AMUNTAI UTARA (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir)

Erni Yunita[1], Agus Surya Dharma[2], Moh. Fajar Noorahman[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : erniyunita957@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui teknik *purposive sampling* yang berjumlah 13 orang Informan. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) cukup terimplementasi dengan baik. Dapat dilihat pertama, Kemampuan Organisasi yaitu indikator kemampuan teknis cukup berjalan dengan baik karena masih pihak pelaksana seperti SubPPKBD belum terlalu terampil dalam penyampaian program KB. Kedua, Informasi yaitu indikator transmisi dan kejelasan informasi kurang berjalan dengan baik karena penyampaian informasi hanya dilakukan satu kali satu bulan di kegiatan tribina. Ketiga, dukungan yaitu indikator sikap menerima/menolak dan partisipasi masyarakat kurang berjalan dengan baik karena masyarakat masih banyak yang menolak dan kurangnya dukungan suami untuk ikut menggunakan KB MKJP. Keempat, Pembagian potensi yaitu indikator pembagian wewenang dan tanggunga jawab cukup berjalan dengan baik karena tidak pembagian khusus untuk KB MKJP.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Berencana (KB)

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the implementation of the Family Planning Program with Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) and the factors that influence its implementation in the villages of Panangkalaan Hulu and Padang Basar Hilir, North Amuntai subdistrict. This research employs a qualitative approach with a descriptive qualitative design. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data sources were obtained through purposive sampling, comprising 13 informants. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The implementation of the Family Planning Program with Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) in the North Amuntai subdistrict (Case Study of Panangkalaan Hulu and Padang Basar Hilir Villages) is reasonably well-implemented. This is evidenced by the following: Firstly, regarding organizational capability, the indicator of technical capability functions adequately, although implementing parties such as SubPPKBD are not yet highly skilled in delivering the Family Planning program. Secondly, concerning information, the indicators of information transmission and clarity do not function effectively because information is only conveyed once a month during tribina activities. Thirdly, pertaining to support, the indicators of acceptance/rejection attitude and community participation do not function well because many people still reject the program, and there is a lack of spousal support for participation in using MKJP contraception. Fourthly, in the division of potential, the indicators of the division of authority and responsibility function adequately, even though there is no specific division for MKJP Family Planning.

Keyword: *Implementation, Family Planning Program*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksi sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibanding pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Peledakan penduduk tentu membawa tantangan dalam meningkat kesejahteraan masyarakat, mencipta lapangan kerja, mengatakansi masalah kemiskinan, meningkat mutu pendidikan dan kesehatan, meningkat infrastruktur, dan pelayanan publik. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan bangsa dan ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Apabila lajunya pertumbuhan penduduk tinggi, maka dituntut kualitas hidup atau kemakmuran semakin tinggi.

Pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi "Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, dan jarak usia ideal melahir, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujud keluarga yang berkualitas. Dan ayat 9 yang berbunyi "Penyelenggara program keluarga berencana adalah proses, cara dan tindakankan untuk melaksanakan program keluarga berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan adanya peraturan tersebut dapat menekan laju pertumbuhan, agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan cepat, maka perlu dilakukan pengendalian penduduk secara bijaksana melalui program Keluarga Berencana. Gerakan Keluarga Berencana ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mampu menurun tingkat kelahiran secara lebih cepat lagi. Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahir, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujud keluarga yang berkualitas. Untuk tujuan tersebut pemerintah perlu mengintervensi dalam mengatur kelahiran tetapi tidak mengurangi hak seseorang sesuai dengan tujuan Program KB secara umum membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Amuntai Utara masih sedikit yang berani ikut menggunakan alat kontrasepsi jangka Panjang, ditemukan beberapa fenomena masalah yang ada di Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir di Kecamatan Amuntai Utara, yaitu :

1. Kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk ikut menggunakan KB MKJP seperti Implan, IUD, Metode Operasi Wanita, dan Metode Operasi Pria karena takut, sakit dan merusak kesehatan yang menurut mereka harus dioperasi dan alat yang akan dimasukkan kedalam rahim maupun kuit. Jadi kebanyakan pasangan usia subur menggunakan Non-MKJP yaitu kondom, pil, dan suntik karena menganggap KB tersebut lebih aman. (*Sumber: Rekap Data Penggunaan KB Kecamatan Amuntai Utara*).
2. Informasi mengenai program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang tidak secara merata menyuluruh sehingga sulit dicerna masyarakat. Jadi, Masyarakat Kurang teredukasi tentang manfaat, efek samping, dan penggunaan alat kontrasepsi MKJP (IUD, Implan, MOW, dan MOP). (Sumber: Observasi penulis awal September 2024)
3. Kurangnya dukungan keluarga dengan pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang, terutama suami mengenai pemilihan alat kontrasespsi. Karena keputusan suami merupakan hal yang mutlak untuk mengijinkan istri untuk menggunakankan alat kontrasepsi (KB). (Sumber: Observasi penulis awal September 2024).

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu bentuk program yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, yaitu dengan cara mengatur perkawinan, kapan harus punya anak, jarak kelahiran, dan mengatur jumlah anak yang ideal dalam suatu keluarga dengan mengguna alat kontrasepsi yang mengarah kepada pria dan wanita.

Sasaran program KB yaitu pasangan usia subur. Pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masi haid (datang bulan).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk menungkap segala sesuatu atau berbagai aspek sasaran penelitiannya. (Anggara, 2015:21). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Sumber data diambil menggunakan teknik *Purposive sampling* berjumlah 13 orang informan. Beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (sugiyono, 2022). Uji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahasa referensi,dan mengadakan *membercheck* (Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang basar Hilir)

Implementasi merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kegiatan yang dilaksanakankan dilihat peranannya dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dilihat oleh pemerintah, tetapi ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

1. Kemampuan Organisasi

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan, seperti yang telah diberikan atau ditetapkan pada suatu organisasi/instansi.

a. Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis adalah sebuah kemampuan yang diperlukan untuk menjalan tugas-tugas teknis dalam bidang tertentu. Kemampuan tersebut meliputi pengetahuan, kompetensi, dan kemampuan bersifat teknik yang dibutuh untuk mengerja tugas dan peran tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai kemampuan teknis cukup berjalan dengan baik karena masih ada pihak pelaksana seperti SubPPKBD yang belum terampil dan belum menguasai materi program KB tersebut sehingga ketika penyuluhan tidak dapat memotivasi banyak masyarakat untuk ikut menggunakan KB MKJP hal tersebut disebabkan dar tingkat pendidikan yang rendah.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan suatu prosedur atau pedoman tata aliran kerja yang memungkin para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai SOP sudah berjalan dengan baik karena pihak pelaksana sudah menjalankan program KB sesuai dengan pedoman pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana.

c. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu proses dalam mengintergrasi seluruh aktivitas dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan yang terjalin antar individu di dalam suatu organisasi demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai Koordinasi sudah berjalan dengan baik karena pihak pelaksana sudah saling berkoordinasi untuk melaksanakan program dan pelayanan KB.

2. Informasi

a. Transmisi

Transmisi merupakan cara suatu data dapat dikirim dari suatu alat dan diterima oleh alat lain. Perpindahan informasi melalui sebuah media telekomunikasi, transmisi memperhati pembuatan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi, serta memasti bahwa informasi sampai secara akurat dan dapat diandal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai transmisi kurang berjalan dengan baik karena tidak ada penyampaian secara luas melalui media sosial seperti instagram, hanya melalui penyuluhan tribina satu kali satu bulan yang kegiatan berisi BKB, BKR, BKL tidak menyeluruh tentang program KB MKJP.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pihak pelaksana haruslah jelas dan tidak membingung ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implmentasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuh kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai kejelasan informasi karena Masyarakat Desa Panangkalaan Hulu masih banyak yang kurang paham dan jelas terhadap informasi khususnya KB MKJP yang disampaikan oleh Penyuluh KB dan Kader KB. Penyuluhan hanya dilakukan pada

kegiatan tribina yang berisi BKB, BKR, BKL, tidak menyeluruh tentang program KB sehingga masyarakat tidak terlalu memahami program KB.

3. Dukungan

Dukungan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) khususnya MKJP terdapat dua dukungan dari masyarakat.

a. Sikap menerima/menolak

Sikap menjadi tolak ukur keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan, informasi yang baik tentang program KB MKJP diharap menghasil sikap positif dengan menerima program KB MKJP di masyarakat. Tetapi, keraguan dan penolakan sebagai bentuk sikap negatif dapat terjadi karena adanya faktor lainnya yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk mengguna KB MKJP.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai sikap menerima/menolak masyarakat kurang berjalan dengan baik karena masyarakat masih banyak menolak dengan program KB MKJP yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif seperti sakit atau merusak kesehatan dan dukungan suami yang lebih menyarankan untuk menggunakan KB Non-MKJP, penolakan tersebut dapat dilihat dari pengguna KB MKJP Di Desa panangkalaan Hulu hanya 16 Orang dan Desa Padang Basar Hilir 7 Orang, kebanyakan memilih menggunakan KB Non-MKJP.

b. Keinginan/Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatakansi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai Keinginan/partisipasi masyarakat kurang berjalan dengan baik karena masyarakat lebih banyak memilih KB Non-MKJP daripada KB MKJP dilihat dari pengguna KB MKJP Di Desa Panangkalaan Hulu ada 16 Orang dari 161 pasangan usia subur, dan Desa Padang Basar Hulir ada 7 Orang dari 79 pasangan usia subur.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi adalah pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam kebijakan publik atau rencana kerja.

a. Pembagian wewenang

Pembagian wewenang adalah penyaluran hak dan tanggung jawab antara pihak pelaksana yang terlibat dalam suatu program, penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki peran dan tugas yang jelas untuk melaksanakan tujuan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai pembagian wewenang cukup berjalan dengan baik karena tidak ada

pembagian khusus dibidang KB MKJP hanya menyeluruh untuk semua program KB dan tidak idealnya pembagian wilayah binaan masing-masing PKB yaitu 4-5 desa.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok Berdasarkan kewajiban, mempunyai sifat kepedulian dan kejujuran yang tinggi. Karena setiap pelaksana suatu kegiatan harus memiliki tanggung jawab yang baik untuk penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) mengenai tanggung jawab cukup berjalan dengan baik karena.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang basar Hilir)

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah proses yang dapat menghambat atau mengagalkan suatu kegiatan yang harusnya berjalan dengan semestinya. Faktor-faktor yang dapat menghambat suatu proses kegiatan tentu akan berdampak negatif.

a. Kurangnya sumber daya pelaksana

Sumber daya pelaksana adalah manusia yang memiliki kemampuan yang diperkerjakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sumber daya merupakan hal yang terpenting untuk menentukan bagaimana program berjalan dengan lancar atau tidak.

Berdasarkan Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi faktor penghambat Implementasi Program KB MKJP di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) adalah kurangnya sumber daya pelaksana. Kurangnya sumber daya pelaksana, ada 6 penyuluh KB untuk 26 desa di Kecamatan Amuntai Utara dengan masing-masing membina 4-5 desa. Seharusnya ideal satu penyuluh KB maksimal membina 2 desa hal tersebut dapat mempengaruhi waktu pendampingan, dan waktu penyampaian informasi program KB khususnya MKJP kepada masyarakat.

b. Isu-isu negatif dari lingkungan sosial masyarakat

Isu negatif adalah suatu berita yang bersifat buruk dan merugikan baik bagi individu maupun kelompok. Sering kali hal-hal negatif ini muncul dari kesenjangan antara harapan publik dan kenyataan, sehingga menggiring asumsi negatif di masyarakat.

Berdasarkan Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi faktor penghambat Implementasi Program KB MKJP di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) adalah isi-isu negatf dari lingkungan sosial masyarakat. Dilihat dari partisipasi masyarakat untuk mengguna KB Masyarakat di Desa Panangkalaan Hulu dan padang Basar Hilir banyak yang menolak untuk KB MKJP karena pengaruh lingkungan masyarakat dengan isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya sehingga lebih memilih KB pil dan suntik.

c. Dukungan suami dalam memilih alat kontrasepsi

Dukungan suami terhadap keputusan istri dalam pemilihan, terutama terkait kesehatan reproduksi, seperti pengunaan kontraseps, sangat penting. Suami yang terlibat aktif dalam diskusi memberikan persetujuan akan meningkatkan kenyamanan istri.

Berdasarkan hasi wawancara, observasi, dan dokumentasi faktor penghambat Implementasi Program KB MKJP di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) adalah dukungan suami dalam pemilihan alat kontrasepsi. Para isteri selalu berkomunikasi lebih dulu dengan suami untuk pemilihan alat kontrasespsi sehingga jika pemilihan alat kontrasepsi tersebut tidak disetujui suami maka para isteri tidak akan menggunanya khususnya KB MKJP dengan isu-isu negatif yang mempengaruhi. Jadi dukungan suami menjadi penghambat dalam penggunaan KB khususnya MKJP. Dilihat dari partispasi masyarakat di Desa Panangkalaan Hulu yang mengguna MKJP hanya 16 orang dari 161 pasangan usia subur dan Desa Padang Basar Hilir yang mengguna MKJP 7 orang dari 79 pasangan usia subur.

d. Penyuluhan /Penyampaian informasi yang dilakukan hanya satu kali satu bulan (melalui kegitan tribina)

Penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan yang memberikan pengetahuan, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai metode baim secara individu maupun kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi faktor penghambat Implementasi Program KB MKJP di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) adalah penyuluhan yang dilakukan satu kali satu bulan (melalui kegiatan tribina). Penyuluhan melalui kegiatan tribina yang berisi BKB,BKR,BKL yang dilaksanakan satu kali satu bulan, tidak seluruhnya dikegiatan tersebut dapat menyampaikan program KB khususnya MKJP. Sedangkan Penyampaian hanya melalui kegiatan langsung di Desa tidak ada penyampaian melalui media sosial seperti instagram, sehingga penyampaian program KB tersebut tidak secara luas menyebar. Hal tersebut dapat menghambat penyampaian informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang membantu mempercepat suatu kegiatan atau proses yang diinginkan cepat tercapai dengan memfasilitasi perilaku individu atau kelompok.

a. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana sudah berjalan sesuai dengan SOP

Program yang sesuai dengan SOP adalah pelaksanaan kegiatan yang mengikuti pedoman atau prosedur yang telah ditetapkan. SOP berfungsi untuk memastikan konsisten dalam menjalankan tugas di berbagai bidang organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi faktor pendukung Implementasi Program KB MKJP di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) adalah Pelaksanaan Program KB sudah berjalan sesuai dengan SOP. Pihak pelaksana dalam penerapan SOP sudah dilaksanakan dengan baik dengan memeriksa kondisi fisik calon akseptor terlebih

dahulu, agar tidak asal-asalan dalam pemasangan dan pencabutan KB MKJP yang harus sesuai dengan SOP.

b. Adanya koordinasi antar pelaksana (Penyuluh KB Kecamatan, Pelaksana desa dan Tenaga Kesehatan.

Koordinasi antar pelaksana adalah proses penyelerasan kegiatan anatara berbagai unit atau individu yang terlibat dalam suatu proyek atau program untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan Hasil wawancara, dan observasi wawancara faktor pendukung Implementasi Program KB MKJP di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) adalah Adanya kerjasama antar pelaksana (Penyuluh KB Keccamatan, pelaksana desa dan Tenaga Kesehatan). Pihak pelaksana sudah baik saling berkoordinasi untuk memberi penyuluhan, pendataan maupun pelayanan.

SIMPULAN

Berdasarkan penyajian/pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) cukup terimplementasi dengan baik. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yaitu: *Pertama*, Kemampuan Organisasi yang meliputi kemampuan teknis cukup berjalan dengan baik karena masih ada pelaksana di Desa seperti SubPPKBD yang belum berani tampil dan belum mampu menguasai materi ketika kegiatan penyuluhan sehingga belum dapat memotivasi banyak masyarakat untuk ikut serta dalam program KB khususnya MKJP. Sedangkan untuk Standar Operasional dan Koordinasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai. *Kedua*, Informasi yang meliputi transmisi dan kejelasn informasi cukup berjalan dengan baik karena penyuluhan dilakukan secara langsung dan setiap satu kali satu bulan, tidak ada penyampaian informasi melalui media sosial seperti instagram sehingga informasi mengenai program KB tidak menyebar secara luas. Dalam kegiatan tribina yang berisi BKB, BKR, dan BKL sehingga penjelasan informasi mengenai Program KB khususnya MKJP tidak secara menyeluruh. *Ketiga*, Dukungan yang meliputi sikap menerima/menolak dan partisipasi masyarakat cukup berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat terpengaruh oleh isu-isu negatif seperti KB MKJP adalah alat yang dimasukkan kedalam tubuh yang akan membuat sakit dan merusak kesehatan sehingga masyarakat merasa takut dan dipengaruhinya oleh dukungan dari suami dalam memilih alat kontrasepsi. Di desa Panangkalaan Hulu partisipasi KB MKJP hanya 16 orang dari 161 pasangan usia subur sedangkan Desa Padang Basar Hili 7 orang dari 79 pasangan usia subur. *Keempat*, Pembagian potensi yang meliputi pembagian wewenang dan tanggung jawab cukup berjalan dengan baik karena pembagian wewenang hanya untuk pembagian wilayah binaan dengan 6 penyuluh KB untuk 26 Desa di Kecamatan Amuntai utara yang masing-masing membina 4-5 desa, tidak pembagian secara khusus untuk KB MKJP. Dalam tanggung jawab masih ada pelaksana desa seperti SubPPKBD yang belum mampu memberi tanggung jawab terhadap tugasnya seperti tidak berani tampil untuk penyuluhan program KB dan belum mampu untuk memberi penjelasan yang dapat memotivasi masyrakat untuk ikut serta dalam program KB khususnya MKJP. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Amuntai Utara (Studi Kasus Desa Panangkalaan Hulu dan Padang Basar Hilir) meliputi faktor penghambat yaitu *Pertama*, Kurangnya sumber daya pelaksana seperti pembagian wilayan binaan penyuluh KB. *Kedua*, isu-isu negatif di lingkungan masyarakat. *Ketiga*, dukungan suami untuk pemilihan alat kontrasepsi.

Keempat, Penyuluhan/penyampaian informasi yang dilakukan hanya satu kali satu bulan. Selanjutnya faktor pendukung yaitu Pelaksanaan Program KB sudah berjalan dengan SOP dan adanya kerjasama antar pelaksana (Penyuluh KB Kecamatan, pelaksana desa dan tenaga kesehatan). Saran yang diberikan yaitu:

1. Kepada Penyuluh KB (PKB) perlu membina kader KB disetiap desa supaya mereka dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam dan memberi pendampingan yang lebih untuk kader KB agar tidak malu-malu dan takut lagi untuk tampil menyampaikan informasi mengenai program KB. Selain itu, melakukan penyampaian atau komunikasi secara aktif seperti datang kerumah-rumah masyarakat seperti membagi leaflet/brosur mengenai MKJP dan aktif di media sosial untuk memposting dari informasi-informasi khusunya MKJP, kegiatan-kegiatan sosialisasi, dan kegiatan pemasangan MKJP agar masyarakat luas dapat melihat bagaimana kegiatan Program KB jadi informasi tidak hanya dibagi melalui penyuluhan di kegiatan tribina tapi juga ada di media sosial seperti instagram.
2. Kepada PPKBD dan SubPPKBD harus bisa menghimbau banyak masyarakat untuk ikut dalam penyuluhan program KB agar informasi program KB dapat menyebar secara merata ke masyarakat, selain itu mereka juga harus bisa menghimbau para pria yang termasuk usia subur untuk ikut serta dalam sosialiasasi jadi tidak hanya para wanita tapi para pria juga perlu mendapat edukasi tentang program KB khususnya MKJP agar tidak terhasut dengan isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya yang pada akhirnya melarang isteri dalam pemilihan kontrasepsi MKJP karena takut.
3. Masyarakat agar lebih membuka wawasan mengenai KB MKJP dari berbagai sudut pandang, terutama dari segi kesehatan sehingga lebih memahami secara luas dan mampu mempertimbangkan untuk ikut serta dalam program KB dikalangan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga*, *Presiden Republik Indonesia*.

Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'IYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Ghalib, S. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di

Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.